



PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
2021- 2026

BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 telah selesai disusun. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Faktor yang mendasar adalah guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Strategis 5 (lima) tahunan. Diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan bertanggungjawab pada kemajuan dibidang pengembangan dibidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat mendukung pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini secara konsisten sesuai dengan peran dan misi masing - masing.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra ini kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Rembang, 9 Mei 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan BPPKAD Kab. Rembang	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016 - 2020	14
Tabel 2.3.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020	17
Tabel 2.4.	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	17
Tabel 2.5.	Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	18
Tabel 2.6.	Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020	19
Tabel 2.7.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	19
Tabel 2.8.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2016 - 2020	20
Tabel 2.9.	Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	21
Tabel 2.10.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2016 - 2020	22
Tabel 2.11.	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	23
Tabel 2.12.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2016 - 2020.....	24
Tabel 2.13.	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	31
Tabel 2.14.	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2020	33
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang.....	45
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	46
Tabel 6.1.	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026	48
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja BPPKAD Kab. Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	52
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 - 2026	52
Tabel 7.3.	Formulasi/Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 – 2026	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi BPPKAD Kabupaten Rembang ...	4
------------	---	---

LAMPIRAN

Cashcading BPPKAD Kabupaten Rembang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar itulah maka tujuan dan sasarannya mendukung atas ketercapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik. Untuk mengarah pada terwujudnya good governance dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik.

Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan sehingga semua personalia akan memahami akan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

21. Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dalam pengelolaan pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga melalui dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang dituangkan ke dalam bentuk visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB III	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV	:	Tujuan dan Sasaran;
BAB V	:	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	:	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII	:	Penutup.

BAB II

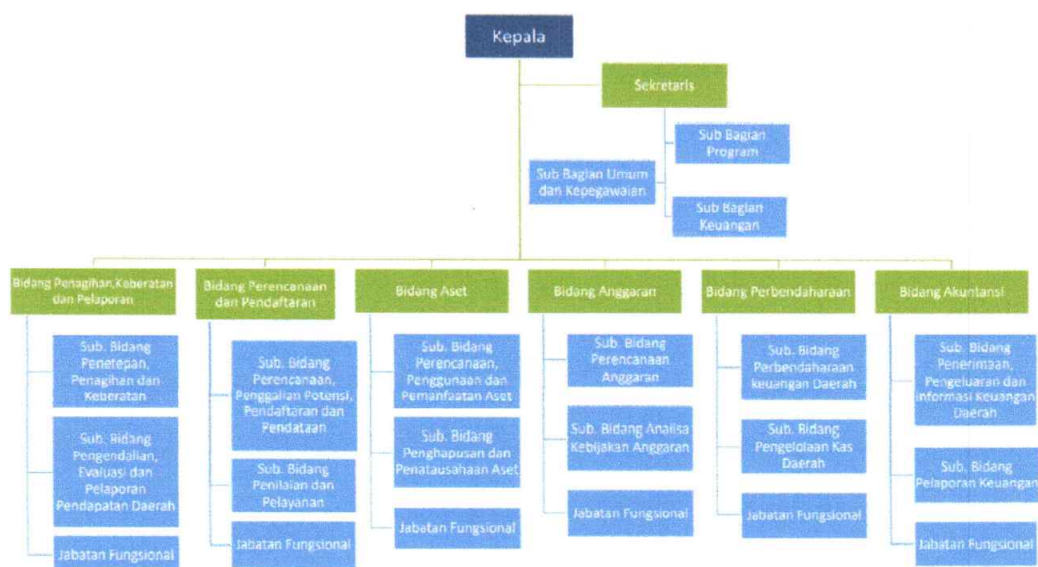
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Badan teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu dalam mengelola aset - aset yang dimiliki oleh daerah dan dapat mengelola keuangan dengan bersih dan optimal baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan serta pendapatan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagaimana susunan Organisasi dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi
BPPKAD Kabupaten Rembang



Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pendaftaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggalan Potensi, Pendaftaran, dan Pendataan;

2. Sub Bidang Penilaian dan Pelayanan;
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- e. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran ;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah;
- g. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Bidang Aset terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Aset;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang secara terperinci sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dengan Rincian sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan;

- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIAT

Tugas : Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi program keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Fungsi :
- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN

Tugas : melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan dan Pendaftaran yang terdiri dari perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
 - b. perencanaan program kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
 - c. perumusan sasaran bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
 - d. penyediaan data dan informasi bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
 - e. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggalian potensi, pendaftaran dan pendataan serta penilaian dan pelayanan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN

Tugas : melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan yang terdiri dari penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. perencanaan program kegiatan bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. perumusan sasaran bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. penyediaan data dan informasi bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penetapan, penagihan dan keberatan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. BIDANG ANGGARAN

Tugas : perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyusunan APBD meliputi perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;
- d. pengkoordinasian dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;
- e. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA-SKPD, DPA/ DPPA-SKPKD dan Surat Penyediaan Dana (SPD)SKPD dan SKPKD;

- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan anggaran dan analisa kebijakan anggaran;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

F. BIDANG PERBENDAHARAAN

Tugas : melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perbendaharaan yang terdiri dari pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah.

- Fungsi** :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - c. pengoordinasian dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan kas daerah , perbendaharaan pengelolaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan penyusunan program kegiatan penganggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

G. BIDANG AKUNTANSI

Tugas : melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Akuntansi yang terdiri dari akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah.

- Fungsi** :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi penerimaan, pengeluaran dan informasi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

H. BIDANG ASET

Tugas : perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aset yang terdiri dari

perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset;
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - d. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset, serta penghapusan dan penatausahaan aset;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan organisasi perangkat daerah tidak lepas dari dukungan personil aparat maupun kualitas SDM yang diselaraskan dengan beban kerja yang diembannya.

Jumlah personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 sebanyak 151 orang terdiri dari:

A. Pegawai menurut status	
1) PNS	: 85 orang
2) CPNS	: 2 orang
3) Kontrak	: 5 orang
4) Harian Lepas	: 59 orang
B. Jenis Kelamin	
1) Pria	: 113 orang
2) Wanita	: 38 orang
C. Pendidikan Formal	
1) S3	: 1 orang
2) S2	: 12 orang
3) S1	: 67 orang
4) D2	: 1 orang
5) SMA/SMK	: 65 orang
6) SMP	: 2 orang
7) SD	: 3 orang
D. Golongan Pangkat	
1) Gol IV	: 8 orang
2) Gol III	: 61 orang
3) Gol II	: 18 orang
4) Gol I	: 0 orang
5) Non Gol./ Kontrak	: 64 orang

- E. Jabatan
- 1) Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 7 orang
 - c) Eselon IV : 15 orang
 - 2) Non struktural : 128 orang
- F. Kualifikasi pekerjaan
- 1) Administrasi : 149 orang
 - 2) Teknis : 2 orang

Optimalisasi peningkatan PAD selain di dukung langkah - langkah yang inovatif dengan melalui Kerja Sama (MOU) dengan pihak ketiga, juga adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.

Dalam Tahun 2022, jumlah Wajib Pajak di daerah Kabupaten Rembang yang tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdiri dari :

-	Wajib Pajak Hotel	=	24	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Restoran	=	3.087	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Sarang Burung	=	57	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Reklame	=	720	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Hiburan	=	34	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Bahan Galian gol C	=	471	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak BPHTB	=	Se-Kab. Rembang	
-	Wajib Pajak PBB	=	401.493	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Parkir	=	86	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak Air Tanah	=	120	Wajib Pajak
-	Wajib Pajak PPJU	=	Se-Kab. Rembang	

Sedangkan Wajib Retribusi (WR) yang menjadi kewenangan BPPKAD Kabupaten Rembang terdiri dari :

-	Sewa Tanah	=	111	Wajib Retribusi
-	Rumah Badan	=	80	Wajib Retribusi

Sebagaimana diatur dalam undang - undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka alat bukti pemungutan Retribusi Daerah dapat digunakan bentuk dokumen lain yang sah seperti karcis, nota dan sejenisnya.

Untuk kelancaran tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan BPPKAD Kab. Rembang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
	A. Alat-alat Besar	1	182,745,000.00
1	- Portable Generating Set	1	182,745,000.00
	B. Komputer	332	3,686,745,729.00
1	- Mainframe (Komputer Jaringan)	4	116,160,000.00

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
2	- Mini Komputer	3	2,700,000.00
3	- PC Unit	42	430,082,390.00
4	- Laptop	92	1,006,532,149.00
5	- Notebook	31	314,650,000.00
6	- Palm Top	2	20,162,500.00
7	- Personal Komputer Lainnya	9	84,475,000.00
8	- CPU (Peralatan Main Frame)	1	10,135,000.00
9	- Hard Disk	1	2,750,000.00
10	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	13,250,000.00
11	- Monitor	4	13,140,000.00
12	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	103	849,646,740.00
13	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	62,631,250.00
14	- External	2	5,800,000.00
15	- Peralatan Personal Komputer Lainnya	9	70,472,000.00
16	- Server	9	554,356,200.00
17	- Router	1	3,000,000.00
18	- Peralatan Jaringan Lainnya	10	126.802.500,00
	C. Alat-alat Angkutan	92	3,488,132,682.00
1	- Station Wagon	9	2,073,084,863.00
2	- Sepeda Motor	83	1,415,047,819.00
	D. Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	1,055,539,900.00
1	- Mesin Bor	1	2,500,000.00
2	- Mesin Pelubang	1	9,850,000.00
3	- Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud	2	1,000,000.00
4	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	9	1,042,189,900.00
	E. Alat Kantor dan Rumah Tangga	831	1,775,483,036,50
1	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2,000,000.00
2	- Mesin Ketik Listrik Portable	3	9,100,000.00
3	- Mesin Hitung Listrik	2	2,750,000.00
4	- Mesin Penghitung Uang	3	43,200,000.00
5	- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	23,910,000.00
6	- Lemari Besi/ Metal	14	48,297,500.00
7	- Lemari Kayu	16	69,458,000.00
8	- Rak Kayu	32	97,470,700.00
9	- Filling Cabinet Besi	23	56,521,000.00
10	- Band Kas	2	31,500,000.00
10	- Lemari Sorok	1	4,240,000.00
11	- Lemari Kaca	7	47,240,000.00
12	- Lemari kayu	5	28,825,000.00
13	- Perkakas Kantor	2	20,627,000.00
14	- Papan Nama Instansi	1	3,233,000.00
15	- Papan Pengumuman	199	174,390,500.00
16	- Overhead Projektor	1	9,115,000.00

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
17	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	7,225,000.00
18	- Lemari Kayu	11	40,633,000.00
19	- Meja Kayu/Rotan	67	99,848,012.50
20	- Kursi Besi/Metal	53	29,737,600.00
21	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	60	52,224,500.00
22	- Meja Rapat	16	55,792,500.00
23	- Meja Telpn	3	2,415,000.00
24	- Kursi Rapat	118	59,884,480.00
25	- Kursi Tamu	6	33,225,000.00
26	- Kursi Putar	24	21,534,000.00
27	- Bangku Tunggu	5	8,999,925.00
28	- Kursi Lipat	15	5,250,000.00
29	- Meja Komputer	14	13,202,500.00
30	- Mesin Penghisap Debu	2	6,000,000.00
31	- AC Split	31	155,581,000.00
32	- Televisi	10	42,949,000.00
33	- Sound System	1	2,845,000.00
34	- Unit Power Supply	40	115,348,360.00
35	- Stabilisator	1	7,120,000.00
36	- Tangga Alumunium	2	5,320,000.00
37	- Dispenser	3	4,450,000.00
38	- Handy Cam	3	27,370,000.00
39	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	46,633,998.00
40	- Alat Pemadam Portable	3	3,465,000.00
58	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	26,260,000.00
59	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	9,862,500.00
60	- Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	4	27,044,000.00
61	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2,175,000.00
62	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	12,722,500.00
63	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	22,975,000.00
64	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	650,000.00
	E. Alat Studio dan Alat Komunikasi	33	260,622,498.00
1	- Camera + Attachment	1	4,400,000.00
2	- Proyektor + Attachment	7	88,508,000.00
3	- Microphone/Wireless Mic	11	69,000,000.00
4	- Power Supply Microphone	1	25,000,000.00
5	- Camera Electronic	9	61,679,498.00
6	- Lensa Kamera	1	6,835,000.00
7	- Pesawat Telephone	2	3,700,000.00
8	- Antena SHF/Parabola Portable	1	1,500,000.00
	TOTAL	1,261	9,468,151,890.50

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta penerapan sistem E-Government, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menerapkan Sistem Aplikasi :

1. SIMPATDA
2. SISMIOP
3. E-PBB

4. E-BPHTB
5. SIPD
6. SIMDA Keuangan
7. SIMDA BMD

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berpijak pada nilai strategis keberadaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas, maka peran dalam mendukung Pendapatan, penyediaan keuangan dan aset daerah cukup memiliki arti yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di daerah.

Sumber-sumber daya dukung organisasi, tidak akan lepas dari tingkat keberhasilan organisasi, baik dari sisi perangkat hidup, perangkat keras dan perangkat lunaknya.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2016 - 2020 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Target Rensitra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,47%	13,41%	13,47%	13,53%	3,84%	21,25%	28,25%	-1,21%	3,97%	5,91%	328,50%	210,66%	-9,01%	29,32%	153,87%
2.	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,52%	-2,69%	-2,52%	-0,69%	11,82%	150,34%	-53,71%	-50,44%	-13,88%	236,37%
3.	Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	100,00%	75,00%	75,00%	85,00%	90,00%	100,00%	100,00%	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Persentase OPD yang Melaporkan Inventaris Barang Tepat Waktu	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Persentase Akuntabilitas Pelaporan Aset Daerah	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	90,00%	95,00%	95,00%	100,00%
8.	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
9.	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
	Rata-rata											130,98%	92,18%	59,51%	78,94%	121,14%

- Dari hasil pengukuran capaian atas 5 (lima) tahun kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) tahun kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan persentase capaian diatas 90,1% dan ada 1 (satu) tahun kinerja dengan persentase diatas sebesar 75,1% dan 1 (satu) tahun kinerja dengan kategori realisasi capaian dengan nilai persentase sebesar diatas 50,1%.
- Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tajam dikarenakan pada tahun 2017 Pendapatan Hibah Dari Dana BOS yang semula berada pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada tahun 2018 dipindah pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Adapun Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020, dengan target WTP dan realisasinya WTP, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada, BPK telah menerbitkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Rembang tahun 2019 dan 2020. Opini tersebut didasarkan atas Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 masih ada beberapa permasalahan yang harus ditindak lanjut.
- Adapun hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" dan "Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target" adalah sebagai berikut :
- 1) Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat mempengaruhi pendapatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - 2) Tidak optimalnya proses pelayanan perubahan SPT PBB-P2;
 - 3) Tidak Validnya data Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 4) Tidak optimalnya Proses Pendataan PBB-P2 Individual;
 - 5) Kurang Updatenya Sistem yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 6) Tidak tertagihnya Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 7) Tidak optimalnya Proses Penagihan PBB-P2;
 - 8) Kurang optimalnya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 9) Kurangnya pengetahuan terhadap proses pemungutan PBB-P2 oleh pemungut tingkat desa.
- Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, BPPKAD Kabupaten Rembang telah melakukan Langkah - langkah pengendalian sebagai berikut :
- 1) Pemberian stimulan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terkena dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - 2) Pengadaan Jasa Konsultasi Pendampingan Pelaksanaan Pendataan PBB-P2 Individual;
 - 3) Intensifikasi pendataan objek Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 4) Pembaharuan Sistem pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 5) Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 6) Optimalisasi Penagihan PBB-P2 dengan melibatkan Kecamatan dan Desa;
 - 7) Intensifikasi dalam Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan melibatkan Satpol PP beserta unsur dari Polres, Kejaksaan dan Kodim;
 - 8) Pemberian Pembekalan terhadap pemungut PBB-P2 pada tingkat desa; dan
 - 9) Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Adapun hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran No. 3 sampai dengan No. 9 adalah sebagai berikut :

- 1) Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, karena ketidakjelasan informasi besar anggaran, banyak SKPD seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak sehingga mempengaruhi deadline awal penganggaran;
- 2) Ketersediaan dana yang terbatas sehingga mempengaruhi waktu dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- 3) Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan reses yang menyimpang dari RPJMD;
- 4) Terlalu banyak "order" dalam proses perencanaan penganggaran yang masing-masing ingin menjadi arus utama;
- 5) Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan penganggaran masih lemah dan SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar misal Dinas Pendidikan dan Dinas PU seringkali tidak mempunyai tenaga perencana dan penganggaran yang memadai;

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, BPPKAD Kabupaten Rembang telah melakukan Langkah-langkah pengendalian sebagai berikut :

- 1) Perencanaan penganggaran yang terstruktur agar besaran penerimaan dan besaran anggaran belanja dapat dihitung secara seimbang sehingga tidak mempengaruhi waktu dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- 2) Sosialisasi kepada Anggota DPRD dan pembahasan secara berkala agar kegiatan - kegiatan reses yang diusulkan agar mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati yang ada pada RPJMD;
- 3) Penentuan skala prioritas program pembangunan yang akan dilakukan agar tepat dalam penganggaran;
- 4) Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan penganggaran melalui FGD dan Pendampingan serta Pemenuhan Tenaga Pendukung dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencanaan Penganggaran agar lebih memadai;

Pengeolaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020 yang di kelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1 Pendapatan Asli Daerah	67.653.077.000	67.386.966.593	130.314.541.380	114.696.844.706	98.116.756.850	83.796.517.446	82.562.676.928	129.004.784.782	118.225.789.696	111.573.860.929
2 Dana Perimbangan	865.902.960.578	1.100.747.729.000	1.100.652.496.000	1.094.799.320.000	1.022.967.423.000	935.943.695.312	1.075.045.860.549	1.071.215.246.998	1.051.964.945.792	1.012.352.994.244
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	406.892.853.733	354.437.862.000	411.652.540.000	466.020.052.000	552.576.173.000	394.756.778.893	346.887.763.674	418.019.391.969	461.489.449.382	538.905.551.321
Jumlah Pendapatan Daerah	1.340.448.891.311	1.522.572.557.593	1.642.619.577.380	1.675.516.216.706	1.673.660.352.850	1.414.496.991.651	1.504.496.301.151	1.618.239.423.749	1.631.680.184.870	1.662.832.506.494

Untuk Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.678.500.000	52.840.500.000	96.286.250.000	100.522.250.000	80.026.500.000	59.734.945.872	100.438.352.553	100.695.231.898	87.544.136.466	
2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000	225.000.000	1.020.015.235	200.000.000	120.000.000	253.961.428	406.321.578	229.507.000	139.053.000	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	17.422.000.000	-	10.840.309.000	-	8.422.000.000	-	11.961.666.343	
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25.774.577.000	14.321.466.593	15.586.276.145	13.974.594.706	7.129.947.850	22.573.768.628	19.738.110.651	17.301.050.798	11.929.005.120	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	67.653.077.000	67.386.966.593	130.314.541.380	114.696.844.706	98.116.756.850	82.562.675.928	129.004.784.782	118.225.789.696	111.573.860.929	

Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatas, maka besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar 6,71% yaitu dengan membandingkan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sebesar Rp. 111.573.860.929,00 dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.662.832.506.494,00.

Sedangkan komposisi realisasi pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2016 - 2020 adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.

**Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	750.000.000	850.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000	1.100.000.000	786.470.750	900.947.867	1.547.385.331	1.465.605.218	1.344.033.894
2	Pajak Restoran	1.750.000.000	2.200.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	2.915.840.720	3.079.057.000	3.645.146.314	3.965.309.311	2.708.044.179
3	Pajak Hiburan	175.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	90.000.000	144.302.500	199.842.500	242.073.750	226.960.488	97.184.384
4	Pajak Reklame	600.000.000	750.000.000	800.000.000	800.000.000	700.000.000	779.695.350	988.263.050	866.975.159	878.723.071	941.071.751
5	Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000	17.200.000.000	22.750.000.000	24.500.000.000	21.500.000.000	13.702.599.311	18.129.943.313	23.455.582.696	25.456.206.827	22.871.774.825
6	Pajak Parkir	8.500.000	9.000.000	20.000.000	150.000.000	90.000.000	8.740.000	11.930.000	72.769.000	167.275.600	93.076.100
7	Pajak Air Tanah	140.000.000	150.000.000	200.000.000	300.000.000	350.000.000	168.785.350	181.252.591	389.209.789	400.038.220	751.391.400
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	6.500.000	7.500.000	8.000.000	6.500.000	7.050.000	9.610.000	8.397.500	8.117.500	6.622.500
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.750.000.000	8.750.000.000	9.583.750.000	15.500.000.000	9.000.000.000	7.984.767.880	11.268.038.067	9.981.091.157	11.896.948.533	10.911.897.716
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.500.000.000	12.000.000.000	45.000.000.000	40.639.250.000	32.690.000.000	10.925.030.028	13.744.078.898	45.410.707.344	41.458.513.844	32.852.395.403
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.500.000.000	10.750.000.000	13.725.000.000	14.000.000.000	12.500.000.000	10.997.672.961	11.221.983.586	14.819.014.513	14.771.553.286	14.966.644.314
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	41.678.500.000	52.840.500.000	96.286.250.000	100.522.250.000	80.026.500.000	48.420.954.850	59.734.946.872	100.438.352.553	100.695.231.898	87.544.136.466

2) Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000	225.000.000	200.000.000	200.000.000	120.000.000	253.961.428	262.142.928	229.507.000	139.053.000	
2	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	820.015.235	-	-	-	144.178.650	-	-	
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah	200.000.000	225.000.000	1.020.015.235	200.000.000	120.000.000	253.961.428	406.321.578	229.507.000	139.053.000	

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	-	-	-	4.326.178.000	-	-	-	-	4.287.984.163
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perbankan	-	-	8.422.000.000	-	6.514.131.000	-	-	8.422.000.000	-	7.673.682.180
3	Pendapatan dari Bendahara	-	-	-	9.000.000.000	-	-	-	-	-	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	17.422.000.000	-	10.840.309.000	-	-	8.422.000.000	-	11.961.666.343

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipsahkan	-	-	-	-	-	116.000.000	180.000.000	169.000.000	80.000.000	-
2	Penerimaan Jasa Giro	10.800.000.000	5.800.000.000	5.991.454.235	5.991.454.235	1.773.790.515	13.775.762.234	8.258.104.243	3.501.301.408	4.083.019.847	2.995.594.748
3	Penerimaan Bunga Deposito	11.133.000.000	6.104.214.721	6.269.370.471	5.983.140.471	2.840.000.000	13.564.170.952	9.641.233.369	10.271.682.940	7.842.369.897	5.080.342.451
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.000.000	514.980	-	-	-	607.498.945	485.414.424	927.093.577	984.981.413	175.061.997
5	Pendapatan Denda Pajak	45.000.000	91.926.836	147.045.639	-	278.806.630	177.863.937	232.715.572	405.796.227	679.159.380	520.613.513
6	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	55.800	-	-	602.120	1.195.950	146.200	364.700	90.220
7	Pendapatan Dari Pengembalian	3.650.577.000	2.240.768.737	3.177.850.000	2.000.000.000	2.237.350.705	6.780.759.366	3.661.253.477	4.237.512.152	3.417.547.918	2.739.459.118
8	Penerimaan Lain-lain	-	57.741.319	-	-	-	-	60.131.593	192.263.803	67.526.185	117.087.207
9	Penerimaan Pihak Ketiga	25.000.000	25.050.000	-	-	-	25.000.000	51.970.000	32.564.334	131.762.663	300.255.866
10	Pendapatan Pencairan Jaminan Sanggahan Banding	-	-	-	-	-	-	-	-	13.818.795	-
11	Pendapatan Denda Administrasi PPAT	1.000.000	1.250.000	500.000	-	-	1.500.000	1.750.000	750.000	500.000	500.000
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.774.577.000	14.321.466.593	15.586.276.145	13.974.594.706	7.129.947.850	35.049.157.554	22.573.768.628	19.738.110.651	17.301.050.798	11.929.005.120

Disamping itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD juga mengelola Pendapatan Transfer dengan Realisasi pada Tahun Anggaran 2016 - 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dana Transfer Umum	706.057.749.578	815.012.255.000	818.442.437.000	850.594.561.000	787.373.341.000	828.385.043.312	816.948.229.807	812.596.054.494	838.539.540.291	781.268.636.918
1	Bagi Hasil Pajak	19.413.000.000	25.078.792.000	26.359.122.000	26.359.122.000	20.656.403.000	28.621.805.639	28.022.881.056	20.192.268.635	14.575.488.939	23.701.164.996
2	DBH Cukai Hasil Tembakau	-	15.742.557.000	18.612.460.000	22.588.559.000	29.463.611.000	-	15.504.169.619	18.612.460.000	22.603.368.201	27.585.260.014
3	DBH-Sumber Daya Alam	14.844.259.000	2.606.539.000	1.886.488.000	1.886.488.000	2.631.703.000	14.382.252.673	1.836.812.132	2.206.958.859	1.600.291.151	2.200.815.908
4	Dana Alokasi Umum	671.800.490.578	771.584.367.000	771.584.367.000	799.760.392.000	734.621.624.000	785.380.985.000	771.584.367.000	771.584.367.000	799.760.392.000	727.781.396.000
B.	Dana Transfer Khusus	159.845.211.000	285.735.474.000	282.210.059.000	244.204.759.000	235.594.082.000	107.558.652.000	258.097.630.742	258.619.192.504	213.425.405.501	231.084.357.326
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	144.904.641.000	127.505.943.000	104.441.988.000	67.492.667.000	69.505.967.000	92.419.410.000	110.696.901.706	89.575.324.617	54.926.458.665	67.297.200.331
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	14.940.570.000	158.229.531.000	177.768.071.000	176.712.092.000	166.088.115.000	15.139.242.000	147.400.729.034	169.043.867.887	158.498.946.836	163.787.156.995
	Jumlah Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan	865.902.960.578	1.100.747.729.000	1.100.652.486.000	1.094.799.320.000	1.022.967.423.000	935.943.695.312	1.075.045.860.549	1.071.215.246.998	1.051.954.945.792	1.012.352.994.244

Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pendapatan Hibah	1.566.904.000	2.566.904.000	57.455.920.000	66.343.640.000	71.595.695.000	1.488.856.904	1.711.800.674	56.967.950.020	66.782.874.842	71.305.442.717
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.566.904.000	2.566.904.000	1.500.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000	1.488.856.904	1.711.800.674	1.000.000.000	3.934.000.000	4.994.000.000
2	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	500.000.000	299.975.000	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS	-	-	55.955.920.000	62.843.640.000	66.295.720.000	-	-	55.967.950.020	62.848.874.842	66.311.442.717
B.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91.058.576.183	96.743.553.000	95.000.000.000	106.030.000.000	105.622.999.000	81.133.459.989	92.803.709.000	105.216.144.949	107.361.335.445	97.043.873.316
1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	91.058.576.183	96.743.553.000	95.000.000.000	106.030.000.000	105.622.999.000	81.133.459.989	92.803.709.000	105.216.144.949	107.361.335.445	97.043.873.316
C.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	286.903.900.550	228.013.715.000	229.010.130.000	258.436.412.000	356.270.479.000	286.903.900.000	228.013.715.000	229.010.130.000	258.436.412.000	356.270.479.000
1	Dana Penyesuaian	286.903.900.550	228.013.715.000	229.010.130.000	258.436.412.000	356.270.479.000	286.903.900.000	228.013.715.000	229.010.130.000	258.436.412.000	356.270.479.000
D.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.363.473.000	27.113.690.000	30.186.490.000	35.210.000.000	19.087.000.000	25.230.562.000	24.358.539.000	26.825.167.000	28.908.827.095	14.285.856.288
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	27.363.473.000	27.113.690.000	30.186.490.000	35.210.000.000	19.087.000.000	25.230.562.000	24.358.539.000	26.825.167.000	28.908.827.095	14.285.856.288
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	406.892.853.733	354.437.862.000	411.652.540.000	466.020.052.000	552.576.173.000	394.756.778.893	346.887.763.674	418.019.391.969	461.489.449.382	538.905.651.321

Adapun Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020 yang di kelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji pada tabel 2.11. sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Belanja Tidak Langsung	347.359.372.500	446.403.531.721	440.316.568.880	482.806.333.568	582.489.292.490	341.101.602.308	440.014.688.873	430.520.314.697	472.273.982.986	568.807.248.369
1	Belanja Pegawai	11.598.546.000	14.133.317.000	16.789.465.865	15.709.600.345	20.641.899.000	10.070.207.947	12.215.132.373	16.080.874.097	14.067.901.574	12.898.715.752
2	Belanja Bunga	37.000.000	-	1.451.355.415	1.631.632.000	1.631.632.000	1.605.011	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	6.600.000.000	-	-	-	-	6.600.000.000
4	Belanja Hibah	29.947.605.500	49.960.402.500	61.787.200.000	55.583.592.000	87.141.810.000	27.269.005.350	46.450.880.000	55.764.388.000	50.515.064.812	83.857.142.000
5	Belanja Bantuan Sosial	7.700.000.000	9.512.000.000	8.980.000.000	8.244.660.000	4.079.720.000	7.446.000.000	8.927.000.000	8.333.700.000	8.093.600.000	3.782.220.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	6.455.961.000	6.455.961.000	10.765.819.900	11.984.474.900	12.357.333.100	6.455.961.000	6.437.223.500	10.765.819.900	11.944.474.900	12.357.333.100
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	290.850.885.000	365.509.851.221	340.042.727.700	388.375.509.700	392.677.638.587	289.842.093.000	365.168.845.000	339.575.532.700	387.652.941.700	392.584.621.600
8	Belanja Tidak Terduga	769.375.000	832.000.000	500.000.000	1.276.864.623	57.359.259.803	16.730.000	815.608.000	-	-	56.727.215.917
B.	Belanja Langsung	16.004.942.532	18.262.767.000	12.811.574.000	16.657.743.156	11.907.774.723	14.074.972.115	16.384.055.581	11.718.883.433	15.268.529.183	11.146.816.749
	Jumlah Belanja Daerah	363.364.315.032	464.666.298.721	453.128.142.860	499.464.076.724	594.397.067.213	355.176.574.423	456.398.744.454	442.239.198.130	487.542.512.169	579.954.065.118

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2016 - 2020 sebagaimana tersaji pada tabel 2.12. berikut ini :

Tabel 2.12.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2016 - 2020

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5.2.	Belanja Langsung	16.004.942.532	18.262.767.000	12.811.574.000	16.657.743.156	11.907.774.723	14.074.972.115	16.384.055.581	11.718.883.433	15.258.529.183	11.146.816.749
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.512.046.000	1.570.500.000	1.581.814.000	1.425.038.000	-	1.384.981.950	1.541.078.200	1.538.534.035	1.331.888.949	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	-	1.182.910	1.155.690	900.000	1.955.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	175.000.000	219.960.000	231.500.000	-	168.201.594	161.990.173	213.311.558	214.427.433	-
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	165.000.000	-	-	-	-	161.073.629	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	354.000.000	405.000.000	388.600.000	388.600.000	-	354.000.000	405.000.000	380.500.000	380.183.000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	65.000.000	68.000.000	68.000.000	-	52.638.000	64.020.300	67.894.500	67.967.200	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	208.500.000	171.500.000	172.000.000	169.000.000	-	172.434.925	171.496.000	171.002.000	168.986.000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	12.000.000	5.000.000	5.000.000	-	12.941.000	7.299.000	5.000.000	4.991.500	-
	Penyediaan Peralaian dan Perlengkapan Kantor	107.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	106.260.750	12.100.300	11.961.300	14.960.000	-
	Penyediaan Peralaian Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000	-	14.703.500	14.876.000	12.914.500	12.959.800	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	10.500.000	9.100.000	9.000.000	-	7.110.000	10.420.000	8.880.000	8.880.000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	65.721.000	61.588.000	56.247.500	62.427.100	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	110.000.000	90.000.000	75.000.000	97.000.000	-	94.023.355	89.574.033	70.199.404	91.338.000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	169.046.000	530.500.000	540.154.000	351.938.000	-	162.374.000	530.499.500	532.184.804	292.825.041	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	15.000.000	13.000.000	9.000.000	10.000.000	-	12.316.987	11.059.204	7.538.469	9.988.875	-
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.514.212.532	317.000.000	279.540.000	336.000.000	-	1.434.103.772	302.985.250	276.327.900	330.254.920	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	868.372.532	-	-	-	-	868.372.532	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	4.180.000	-	4.900.000	-
	Pengadaan Mebeleur	61.900.000	-	-	-	-	44.370.000	-	-	-	-

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	165.000.000	80.000.000	68.500.000	68.500.000	-	122.895.500	71.872.000	68.360.000	66.713.000	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	124.940.000	-	-	-	-	118.210.025	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	168.000.000	165.000.000	133.500.000	193.500.000	-	165.447.475	162.483.250	130.494.150	190.868.920	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	14.998.000	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	-	-	53.000.000	48.000.000	-	-	-	52.980.000	47.980.000	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	32.000.000	-	-	-	-	28.412.840	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air	11.000.000	7.000.000	9.540.000	6.000.000	-	6.300.000	4.450.000	9.493.750	4.795.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	58.000.000	60.000.000	-	-	-	56.146.500	60.000.000	-	-	-
	Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemda	25.000.000	-	-	-	-	23.948.900	-	-	-	-
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	393.000.000	217.000.000	28.600.000	19.500.000	-	357.589.000	207.135.920	26.535.360	18.788.350	-
	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM	33.000.000	7.000.000	-	-	-	7.970.000	-	-	-	-
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	60.000.000	60.000.000	28.600.000	19.500.000	-	59.212.400	57.793.320	26.535.360	18.788.350	-
	Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur	85.000.000	75.000.000	-	-	-	82.904.100	74.500.000	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS	215.000.000	75.000.000	-	-	-	207.502.500	74.842.600	-	-	-
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	190.600.000	143.000.000	80.370.000	49.000.000	-	183.624.762	136.039.160	76.588.860	46.122.750	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	11.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-	10.042.023	5.000.000	3.000.000	2.708.000	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	41.500.000	30.000.000	-	-	-	41.294.500	27.234.300	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	32.500.000	43.000.000	24.185.000	13.500.000	-	31.400.000	40.450.960	23.418.320	13.349.750	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	-	47.087.759	5.000.000	3.590.970	2.921.000	-
	Penyusunan Renstra, Renja	13.200.000	20.000.000	20.000.000	11.000.000	-	13.200.000	19.213.900	18.449.010	10.986.750	-
	Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran	-	35.000.000	25.185.000	18.500.000	-	-	34.140.000	24.415.080	16.157.250	-
	Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan	42.400.000	-	-	-	-	40.600.480	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah	-	5.000.000	4.000.000	-	-	-	5.000.000	3.715.480	-	-

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
07	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	4.977.250.000	4.519.650.000	-	-	4.297.804.901	3.893.742.489	-	
	Pemeliharaan Data dan Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	46.800.000	47.000.000	-	-	40.350.000	37.750.000	-	
	Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	998.150.000	901.800.000	-	-	867.780.137	650.187.909	-	
	Pendataan Ulang/Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Massal	-	-	352.360.000	-	-	-	300.446.914	-	-	
	Koordinasi dan Verifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	160.600.000	157.600.000	-	-	135.644.785	130.170.621	-	
	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	1.465.680.000	1.465.680.000	-	-	1.216.211.660	1.181.302.438	-	
	Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	243.500.000	243.500.000	-	-	214.830.233	207.617.579	-	
	Sosialisasi dan Pembekalan terhadap Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	675.000.000	675.000.000	-	-	612.293.000	639.842.500	-	
	Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	-	-	422.750.000	527.000.000	-	-	382.480.405	442.571.442	-	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	-	-	612.410.000	502.070.000	-	-	527.767.767	404.300.000	-	
08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.395.084.000	16.015.267.000	5.864.000.000	10.308.555.156	-	10.714.672.631	5.502.992.377	9.847.731.725	-	
	Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/ Pemda	60.000.000	75.000.000	16.550.000	35.000.000	-	39.812.500	16.483.280	31.044.630	-	
	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah/ pemda	100.000.000	105.000.000	40.550.000	41.825.000	-	71.859.400	36.636.500	38.377.200	-	
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	45.000.000	45.000.000	26.000.000	-	-	40.522.500	16.401.300	-	-	
	Fasilitasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	29.600.000	37.000.000	17.500.000	117.500.000	-	29.600.000	15.601.450	101.241.700	-	
	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Surat Keputusan	27.500.000	30.000.000	4.000.000	-	-	25.700.000	4.000.000	-	-	
	Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	145.000.000	103.000.000	260.100.000	360.875.000	-	136.100.000	251.894.380	355.463.850	-	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perangungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000	103.000.000	110.000.000	86.175.000	-	92.213.000	103.752.000	83.743.679	-	

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000	60.000.000	48.000.000	42.000.000	-	61.738.000	37.150.760	37.356.970	35.572.530	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000	100.000.000	94.850.000	79.900.000	-	99.338.000	82.139.750	81.525.500	74.842.360	-
	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	255.500.000	205.000.000	173.000.000	77.500.000	-	210.032.700	182.579.930	151.333.080	72.098.933	-
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000	50.000.000	40.000.000	20.000.000	-	55.380.000	40.594.500	25.742.000	19.512.000	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	100.000.000	81.500.000	34.000.000	25.000.000	-	81.491.000	75.410.760	22.845.340	23.350.270	-
	Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan	100.000.000	82.500.000	54.000.000	60.000.000	-	87.273.000	68.553.450	53.575.950	58.549.500	-
	Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi	100.000.000	93.000.000	45.925.000	50.000.000	-	95.652.160	86.598.600	27.015.920	40.709.860	-
	Fasilitasi E- Audit dan Sistem Informasi Keuangan Daerah	100.000.000	75.000.000	42.000.000	30.000.000	-	87.363.500	69.254.500	34.553.790	28.476.500	-
	Fasilitasi Konversi Data Aset Akuntansi Tetap	100.000.000	70.000.000	57.500.000	30.000.000	-	78.467.000	54.235.000	47.674.880	26.000.367	-
	Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja	100.000.000	79.500.000	55.000.000	29.100.000	-	88.810.700	73.696.400	45.018.620	26.157.890	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	70.000.000	125.000.000	-	-	-	67.715.000	122.939.800	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	145.000.000	150.000.000	180.000.000	245.000.000	-	144.446.065	150.000.000	179.900.000	237.176.707	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	150.000.000	210.000.000	170.000.000	260.000.000	-	148.643.000	209.950.000	169.205.233	254.244.517	-
	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Verifikasi Anggaran	380.000.000	325.000.000	375.000.000	360.000.000	-	359.345.000	320.546.000	368.532.500	327.674.500	-
	Pengelolaan kas daerah	310.000.000	420.500.000	320.000.000	380.000.000	-	288.717.850	419.260.000	319.117.000	360.066.720	-
	Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran	90.000.000	180.000.000	130.000.000	150.000.000	-	89.317.760	180.000.000	127.930.000	149.874.250	-
	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengebala Keuangan Daerah	95.000.000	100.000.000	75.000.000	75.000.000	-	94.545.000	100.000.000	75.000.000	73.975.370	-
	Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah	90.000.000	165.000.000	92.000.000	87.000.000	-	89.984.000	165.000.000	87.560.000	81.974.500	-
	Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	375.000.000	435.000.000	340.000.000	410.000.000	-	374.814.450	434.269.475	338.640.236	403.289.416	-
	Kompilasi dan Validasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran,	100.000.000	125.000.000	64.000.000	84.000.000	-	99.650.000	123.100.000	63.865.000	82.386.100	-

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan													
	Penerbitan dan Verifikasi Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Kas	115.000.000	185.000.000	73.000.000	93.000.000	-	115.000.000	185.000.000	72.955.000	92.954.600	-	-	-	-
	Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	77.771.498	79.785.000	79.577.500	78.999.000	-	-	-	-
	Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah	110.000.000	175.000.000	165.000.000	205.000.000	-	109.233.506	174.803.433	163.014.619	200.591.084	-	-	-	-
	Sosialisasi Permencagri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	40.000.000	50.000.000	45.000.000	265.000.000	-	36.499.000	50.000.000	45.000.000	207.203.700	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	200.000.000	195.000.000	-	-	-	199.114.912	173.071.171	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	65.000.000	50.000.000	45.000.000	65.000.000	-	62.380.000	49.975.000	44.400.000	59.293.500	-	-	-	-
	Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	95.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	91.739.000	49.650.000	58.607.000	-	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	40.000.000	60.000.000	36.000.000	36.000.000	-	37.300.000	59.000.000	36.000.000	35.917.250	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Semesteran Pemerintah Daerah	-	-	16.625.000	27.500.000	-	-	-	15.287.000	24.546.840	-	-	-	-
	Pengelolaan Benda-Benda Berharga	55.000.000	32.000.000	49.000.000	47.800.000	-	32.615.000	31.350.880	48.489.420	44.903.000	-	-	-	-
	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang	116.000.000	100.000.000	87.400.000	89.000.000	-	112.717.675	97.939.383	81.175.000	82.567.000	-	-	-	-
	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	130.000.000	150.000.000	90.000.000	90.000.000	-	127.883.000	148.852.000	88.629.067	84.120.800	-	-	-	-
	Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya/ Kegiatan Pemerintah Daerah	125.000.000	150.000.000	90.000.000	215.000.000	-	114.431.637	134.153.200	86.315.300	175.938.500	-	-	-	-
	Fasilitasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000	50.000.000	45.000.000	20.000.000	-	44.602.000	43.360.000	42.067.000	15.798.200	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	-	50.000.000	45.000.000	20.000.000	-	-	44.243.750	41.535.000	15.275.300	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Milik Daerah	7.800.000	4.295.000.000	400.000.000	4.600.180.156	-	-	4.108.671.700	353.490.500	4.545.757.800	-	-	-	-
	Pengamanan Barang Daerah (Pensertifikatan Tanah)	115.000.000	150.000.000	200.000.000	230.000.000	-	113.841.400	62.450.000	190.400.400	204.289.500	-	-	-	-
	Perubahan Status Hukum Barang Daerah Melalui Mekanisme Penghapusan dan Penjualan	120.000.000	140.000.000	102.500.000	70.000.000	-	84.131.400	117.786.733	95.277.500	59.746.650	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	100.000.000	182.400.000	50.000.000	-	-	-	180.355.120	47.762.551	-	-	-	-

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Daerah	-	105.000.000	90.000.000	30.000.000	-	82.525.109	85.806.438	24.244.910	-	
	Penyenggaraan Inventarisasi, Pendataan dan Sensus Barang Daerah (Aplikasi SIMBADA)	422.275.000	725.000.000	278.500.000	270.000.000	-	636.778.450	254.704.372	243.116.430	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Tertib Pengelolaan Barang Daerah	25.000.000	10.000.000	9.000.000	-	-	8.213.200	8.450.000	-	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan, Pemanfaatan, dan Penilaian Barang Daerah	-	330.300.000	260.600.000	-	-	320.662.950	194.123.600	-	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah	43.500.000	75.000.000	115.000.000	255.200.000	-	73.775.500	109.182.700	223.365.590	-	
	Fasilitasi e-Budgeting	-	-	150.000.000	-	-	-	150.000.000	-	-	
	Penyusunan Dokumen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000	-	-	
	Rekonsiliasi data untuk penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja	-	-	40.000.000	-	-	-	39.265.000	-	-	
	Penyusunan Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Daerah	-	-	-	70.000.000	-	-	-	66.654.400	-	
	Fasilitasi Penilaian Barang Daerah	-	-	-	134.000.000	-	-	-	130.810.600	-	
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	175.425.000	-	-	-	-	141.584.111	-	-	-	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	6.902.484.000	5.207.967.000	-	-	-	5.737.867.781	4.211.299.778	-	-	
	Koordinasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi	55.000.000	55.000.000	-	-	-	3.078.600	-	-	-	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	22.000.000	-	-	-	-	22.000.000	-	-	-	
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tugas Pembantuan / Urusan Bersama (TP/UB)	53.000.000	10.000.000	9.000.000	-	-	41.257.000	3.609.000	-	-	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	15.000.000	-	-	-	-	14.975.000	-	-	-	
07	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.994.448.344	-	-	-	-	1.944.892.939	
	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	-	-	-	1.136.182.115	-	-	-	-	1.092.868.914	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	356.663.186	-	-	-	-	353.381.675	

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	11.212.590	-	-	-	-	11.096.800
	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	-	-	-	-	13.956.800	-	-	-	-	13.953.250
	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	-	-	-	-	304.728.200	-	-	-	-	302.658.800
	Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga	-	-	-	-	171.705.453	-	-	-	-	170.933.500
08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	51.810.180	-	-	-	-	51.568.250
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	34.364.180	-	-	-	-	34.182.500
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	-	-	-	17.446.000	-	-	-	-	17.385.750
09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	7.196.000	-	-	-	-	6.195.500
	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	-	-	-	-	7.196.000	-	-	-	-	6.195.500
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	3.836.312.648	-	-	-	-	3.265.279.755
	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	926.734.000	-	-	-	-	819.691.020
	Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	2.650.336.013	-	-	-	-	2.241.082.335
	Penatausahaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	259.242.635	-	-	-	-	204.506.400
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	-	541.930.231	-	-	-	-	531.977.302
	Penyajian Data Laporan Penerimaan	-	-	-	-	10.831.000	-	-	-	-	8.815.400
	Penyajian Data Laporan Belanja	-	-	-	-	25.932.990	-	-	-	-	24.977.700
	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	-	-	-	-	424.109.991	-	-	-	-	418.155.992
	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	-	-	-	-	26.843.250	-	-	-	-	26.736.900
	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	-	-	-	54.213.000	-	-	-	-	53.291.310
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	2.315.000.000	-	-	-	-	2.274.405.891

Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	-	-	-	-	1.355.835.000	-	-	-	-	1.327.561.476
	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	141.100.000	-	-	-	-	135.712.250
	Pengelolaan Perbendaharaan	-	-	-	-	818.065.000	-	-	-	-	811.132.165
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	3.161.077.320	-	-	-	-	3.072.497.112
	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	-	-	-	-	1.909.749.018	-	-	-	-	1.892.477.400
	Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	-	-	-	-	434.011.485	-	-	-	-	412.112.446
	Penghapusan dan Penatausahaan BMD	-	-	-	-	817.316.817	-	-	-	-	767.907.266

Sedangkan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 - 2020 yang di kelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji pada tabel 2.13. sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	396.607.873.805	214.875.996.411	108.161.445.444	155.692.630.540	120.143.795.817	396.607.873.806	214.495.185.983	117.161.445.444	75.415.765.916	40.143.475.817
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	396.607.873.805	214.875.996.411	108.161.445.444	75.692.630.540	40.143.795.817	396.607.873.806	214.495.185.983	117.161.445.444	75.415.765.916	40.143.475.817
	Pelampauan Penerimaan PAD	7.211.055.736	16.371.437.607	9.838.535.928	4.157.236.653	-	7.211.055.736	16.371.437.607	117.161.445.444	4.157.236.653	-
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	65.628.551.832	-	-	-	-	65.628.561.832	-	-	-
	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.731.467.878	2.853.775.000	2.000.000.000	276.864.623	3.850.690.757	40.731.467.878	2.853.775.000	-	276.864.623	7.737.000.000
	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	233.099.062.334	96.996.380.806	78.933.276.199	67.964.982.229	29.728.235.619	233.099.062.335	96.996.380.806	-	67.964.982.229	32.406.795.817
	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Tersesalkan	-	-	-	-	3.886.309.243	-	-	-	-	-
	Sisa Belanja DAK	115.566.287.857	21.107.168.221	13.417.899.603	3.292.937.035	839.255.195	115.566.287.857	21.107.168.196	-	3.292.937.035	-
	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	-	10.467.714.007	2.203.217.719	-	1.724.992.423	-	10.467.714.007	-	-	-
	Koreksi SILPA	-	-	-	-	-	-	-380.720.428	-	-276.864.625	-320.000
	Sisa Belanja DAK Non Fisik	-	1.450.868.938	1.768.515.995	610.000	114.312.580	-	1.450.868.963	-	610.000	-

No	Jenis Pendapatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	80.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	80.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah	-	-	-	-	80.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	80.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.325.000.000	9.445.838.701	12.717.627.920	85.868.368.000	89.168.368.000	12.296.725.422	8.228.389.150	10.461.079.920	3.000.000.000	10.461.079.920	3.000.000.000	5.300.000.000	
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.270.000.000	8.189.000.000	10.422.000.000	3.000.000.000	5.300.000.000	12.270.000.000	8.189.000.000	10.422.000.000	3.000.000.000	10.422.000.000	3.000.000.000	5.300.000.000	
	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.270.000.000	8.189.000.000	10.422.000.000	3.000.000.000	5.300.000.000	12.270.000.000	8.189.000.000	10.422.000.000	3.000.000.000	10.422.000.000	3.000.000.000	5.300.000.000	
2	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000	-	2.256.548.000	83.868.368.000	83.868.368.000	26.725.422	-	-	-	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	55.000.000	-	2.256.548.000	83.868.368.000	80.000.000.000	26.725.422	-	-	-	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	3.868.368.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Restitusi Atas Kelebihan Penetapan Pajak	-	1.256.838.701	39.079.920	-	-	-	39.389.150	39.079.920	-	39.079.920	-	-	
	Restitusi Atas Kelebihan Penetapan Pajak	-	1.256.838.701	39.079.920	-	-	-	39.389.150	39.079.920	-	39.079.920	-	-	
	Pembiayaan Netto	384.282.873.805	205.430.067.710	95.443.817.524	68.824.262.540	30.975.427.817	384.311.148.384	206.266.796.833	106.700.365.524	72.415.765.916	106.700.365.524	34.843.475.817		

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2020 yang berupa Anggaran dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.907.774.723,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.146.816.749,00 sehingga diperoleh capaian keuangan sebesar 93,61 %. Adapun Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.14. berikut ini :

Tabel 2.14.
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2020

Ko de	Program, Kegiatan, Dan Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan TA. 2020	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Umum	90,00%	90,00%	100,00%	1.994.448.344	1.944.892.939	97,52%	2,48%
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,00%	90,00%	100,00%				
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	90,00%	90,00%	100,00%				
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	90,00%	90,00%	100,00%				
01	Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	1.136.182.115	1.092.868.914	96,19%	3,81%
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100,00%	100,00%	100,00%	356.663.186	353.381.675	99,08%	0,92%
03	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	11.212.590	11.096.800	98,97%	1,03%
04	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Pelaporan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	13.956.800	13.953.250	99,97%	0,03%
06	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Persentase Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayaninya Usulan Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	304.728.200	302.658.800	99,32%	0,68%
07	Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-benda Berharga	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	100,00%	100,00%	100,00%	171.705.453	170.933.500	99,55%	0,45%
08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap	65,00%	65,00%	100,00%	51.810.180	51.568.250	99,53%	0,47%

Ko de	Program, Kegiatan, Dan Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan TA. 2020	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah							
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	100,00%	100,00%	100,00%	34.364.180	34.182.500	99,47%	0,53%
	02 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,00%	87,50%	87,50%	17.446.000	17.385.750	99,65%	-12,15%
09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90,00%	90,00%	100,00%	7.196.000	6.195.500	86,10%	13,90%
	01 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90,00%	90,00%	100,00%	7.196.000	6.195.500	86,10%	13,90%
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100,00%	107,40%	107,40%	3.836.312.648	3.265.279.755	85,12%	22,28%
	01 Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bertambah 5% dari Potensi Tahun Sebelumnya)	5,00%	1,72%	34,38%	926.734.000	819.691.020	88,45%	-54,07%
	02 Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100,00%	109,39%	109,39%	2.650.336.013	2.241.082.335	84,56%	24,84%
		Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100,00%	111,08%	111,08%				
	03 Penatausahaan Pendapatan Daerah	Persentase Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	259.242.635	204.506.400	78,89%	21,11%
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	95,00%	95,00%	100,00%	541.930.231	531.977.302	98,16%	1,84%
	01 Penyajian Data Laporan Penerimaan	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	10.831.000	8.815.400	81,39%	18,61%
	02 Penyajian Data Laporan Belanja	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	25.932.990	24.977.700	96,32%	3,68%
	03 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	424.109.991	418.155.992	98,60%	1,40%
	05 Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	Persentase Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD dan SPB pada Satuan Pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	26.843.250	26.736.900	99,60%	0,40%
	06 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keu.	1 SIM Keu.	100,00%	54.213.000	53.291.310	98,30%	1,70%

Ko de	Program, Kegiatan, Dan Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan TA. 2020	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	2.315.000.000	2.274.405.891	98,25%	1,75%
	01 Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun	2 Dok.	2 Dok.	100,00%	1.355.835.000	1.327.561.476	97,91%	2,09%
	02 Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan	95,00%	95,00%	100,00%	141.100.000	135.712.250	96,18%	3,82%
	03 Pengelolaan Perbandaharaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 Dok.	5 Dok.	100,00%	818.065.000	811.132.165	99,15%	0,85%
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	95,00%	100,00%	105,26%	3.161.077.320	3.072.497.112	97,20%	8,07%
	01 Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	Persentase Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil	95,00%	100,00%	105,26%	1.909.749.018	1.892.477.400	99,10%	6,17%
		Persentase Penggunaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	95,00%	100,00%	105,26%				
	02 Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	90,00%	95,00%	105,56%	434.011.485	412.112.446	94,95%	10,60%
	03 Penghapusan dan Penatausahaan BMD	Persentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	95,00%	95,00%	100,00%	817.316.817	767.907.266	93,95%	6,05%
	JUMLAH				101,81%	11.907.774.723	11.146.816.749	93,61%	8,20%

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari Pagu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.907.774.723,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.146.816.749,00 sehingga diperoleh capaian keuangan sebesar 93,61% dengan capaian kinerja sebesar 101,81%. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja rata - rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja rata - rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS diinput ke dalam aplikasi penganggaran sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yakni Bank Jateng. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD.

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang juga berperan mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aset daerah di Kabupaten Rembang. Beberapa langkah dalam pengelolaan aset pemerintah daerah meliputi : perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan sampai dengan penghapusan yang sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang direncanakan akan terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIMDA Keuangan).

Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang terdapat pada Laporan BMD harus mencerminkan atau sama dengan yang dicantumkan dalam neraca daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.

Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang. Proses

inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan.

Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka : penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada masa yang akan datang, antara lain :

- a. Ketersediaan gedung dan sarana mobilitas yang belum memadai serta kemampuan aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu peningkatan;
- b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Belanja Daerah relatif masih rendah;
- c. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
- d. Opini WTP atas LKPD Kabupaten Rembang dengan masih menyisakan beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti; dan
- e. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah.

Adapun strategi penyelesaian permasalahan dalam rangka menyelesaikan isu-isu permasalahan terkait penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Sarana prasarana, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :
 - 1) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - 2) Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement (penegakan hukum) bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - 6) Peningkatan kualitas petugas pemungut pajak/retribusi daerah;
 - 7) Updating database pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - 8) Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga); dan
 - 9) Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB-P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.

- c. Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan tepat waktu dan akuntabel dalam menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD;
- d. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; dan
- e. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan Tertib Pengelolaan BMD dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah melalui :
 - 1) Peningkatan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - 2) Peningkatan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Optimalisasi fitur - fitur dalam SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
 - 4) Klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - 5) Peningkatan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Belum validnya data obyek dan wajib pajak;
- 3) Belum semua potensi pajak dan retribusi daerah digali secara optimal;
- 4) Belum optimalnya sinkronisasi antar sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan;
- 5) Pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan aset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset belum memadai;
- 6) Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset masih kurang memadai;
- 7) Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dan belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran;
- 8) Masih rendahnya komitmen SKPD dalam menindaklanjuti temuan-temuan LHP BPK RI;
- 9) Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- 10) Kurangnya Pemahaman aparatur pengelola keuangan perangkat daerah mengenai SAP berbasis akrual;
- 11) Adanya keterlambatan Penyampaian laporan keuangan oleh perangkat daerah;
- 12) Belum tersedianya kantor BPPKAD dalam satu atap

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang pada periode tahun anggaran 2021 - 2026, mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Rembang.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang yaitu "**Rembang Gemilang 2026**". **GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampil** dan **gambIANg**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
- 3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 4) Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Dari keempat Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kesatu **"Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi"**.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematangan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);

- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - (6) Rata rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.**
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak - hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri di atas, Tujuan yang relevan sebagai acuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka menyusun rencana strategisnya yakni Tujuan Strategis Kedua "**Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)**" dan Sasaran Strategi Ketujuh

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis **“Rata - rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan ke dalam kebijakan program dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi

Badan Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang untuk kurun waktu 2021 - 2026, maka isu strategis organisasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Opini WTP atas LKPD Kabupaten Rembang dengan masih menyisakan beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti;
- 2) Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
- 3) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Belanja Daerah relatif masih rendah;
- 4) Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
- 5) Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
- 6) Ketersedian gedung dan sarana mobilitas yang belum memadai serta kemampuan aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu peningkatan.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPPKAD Kabupaten Rembang berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga dapat mempertahankan ketercapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Rembang dan penyelesaian atas beberapa temuan dalam LHP BPK serta selalu berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pelayanan publik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan BPPKAD Kabupaten Rembang mendukung Misi I pada Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”, Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih” dan Sasaran I yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”. Adapun Tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel. Indikator Tujuan : Opini BPK Atas LKPD.
2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD Kabupaten Rembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
BPPKAD Kabupaten Rembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Opini BPK Atas LKPD	Opini	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	85	NA	90	92,5	95	97,5	100
(1) Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	NA	NA	70	72,5	75	77,5	80
		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	17,39	NA	17,84	18,66	19,5	20,36	21,23
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	%	1,72	NA	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan ke dalam kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, visi, misi organisasi.

Terkait dengan pelaksanaannya dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 - 2026 maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Rembang Gemilang 2026”			
Misi : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”			
Tujuan Daerah : “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”			
Sasaran Daerah : “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”			
Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Komitmen Pimpinan dalam Penyampaian KUA, Rancangan APBD dan Kesepakatan Rancangan APBD yang Tepat Waktu Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui SIPD dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan
Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan Tertib Pengelolaan BMD	Peningkatan mutu SDM pengelola BMD dan Pengelolaan BMD melalui aplikasi SIMDA BMD
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan dan Peningkatan kesadaran terhadap pembayaran Pajak, optimalisasi penarikan pajak, dan perbaikan pelayanan pajak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.

Rencana program dan Kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 - 2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Reinstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5.2		KEUANGAN																	
	5.2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
				Milai Sakip PD	67,64	72,64	31.478.281.765	470.053.088.765	33.277.313.000	493.690.069.000	34.967.312.000	518.369.235.000	36.715.679.000	544.287.701.000	38.551.486.000	571.502.089.000	38.551.486.000			
				KCM PD	80	82	63.825.000	63.800.000	73.316.000	73.316.000	76.962.000	80.831.000	80.831.000	84.874.000	84.874.000	84.874.000	84.874.000			
	5.2.1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	85%	100%														
	5.2.1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	92,5%	95%	28.073.725.507	28.073.725.507	29.452.527.000	30.361.284.000	30.361.284.000	32.488.847.000	32.488.847.000	34.123.790.000	34.123.790.000	34.123.790.000				
	5.2.1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	92,5%	95%	63.800.000	63.800.000	76.140.000	73.848.000	73.848.000	77.331.000	77.331.000	81.167.000	81.167.000	81.167.000				
	5.2.1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Umum	92,5%	95%	385.950.000	385.950.000	414.899.000	439.845.000	439.845.000	481.838.000	481.838.000	484.930.000	484.930.000	484.930.000				
	5.2.1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	92,5%	95%	549.500.000	549.500.000	647.976.000	860.375.000	860.375.000	934.894.000	934.894.000	981.639.000	981.639.000	981.639.000				
	5.2.1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cecerukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	92,5%	95%	2.044.463.258	2.044.463.258	2.157.186.000	2.265.046.000	2.265.046.000	2.378.298.000	2.378.298.000	2.497.213.000	2.497.213.000	2.497.213.000				
	5.2.1	2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	92,5%	95%	245.016.000	245.016.000	257.269.000	270.132.000	270.132.000	283.640.000	283.640.000	297.823.000	297.823.000	297.823.000				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel				Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Fenstra Peringkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	90%		92,6%		95%		97,5%		100%					
		5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KELANGGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	96,42%	95%	433.374.787.000	95%	455.043.528.000	95%	477.795.709.000	95%	501.685.496.000	95%	528.769.770.000	95%	528.769.770.000		
				Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA, PFAS, RAPBD dan APBD	NA	90%		92,5%		95%		97,5%		100%					
				Persentase Penyempitan LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA, PPAS dan Rancangan APBD	100%	100%	1.180.000.000	100%	1.239.000.000	100%	1.300.952.000	100%	1.366.001.000	100%	1.434.300.000	100%	1.434.300.000	Bidang Anggaran	BPPKAD Rembang
				Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda/APBD yang Dibindakanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100%	100%	769.744.000	100%	809.231.000	100%	848.645.000	100%	881.076.000	100%	935.628.000	100%	935.628.000	Bidang Perbendaharaan	BPPKAD Rembang
				Persentase Realisasi Penempatan Dana Transfer pada RKUD	95%	95%		95%		95%		95%		95%					
		5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pencatatan Akuntansi Penemuan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	100%	650.000.000	100%	682.500.000	100%	719.627.000	100%	752.459.000	100%	790.083.000	100%	790.083.000	Bidang Akuntansi	BPPKAD Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pencapaian												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Persentase Kesiapan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%						100%		100%		100%				
		5.2.2	2.04	Penunjang Urusan Kelemangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	90%	452.313.795.300	474.929.485.000	498.675.960.000	523.609.759.000	523.609.759.000	96%	96%	96%	96%	96%	523.609.759.000	Bidang Pembendaharaan	BPPKAD Rembag	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milk Daerah			Indeks Pengelolaan Barang Milk Daerah	NA	70%				72,5%		75%		77,5%		80,0%				
		5.2.3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	95%	100%	1.000.000.000	982.250.000	1.041.864.000	1.063.658.000	1.063.658.000	100%	100%	100%	100%	100%	1.063.658.000			
		5.2.3	2.01	Pengelolaan Barang Milk Daerah	3. Dak	100%	1.000.000.000	982.250.000	1.041.864.000	1.063.658.000	1.063.658.000	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	1.063.658.000	Bidang Aset	BPPKAD Rembag	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	3. Dak	100%				100%		100%		100%		100%				
				Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	90%	90%				91,5%		93%		94,5%		96%				
				Terselenggaranya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuratibel	95%	95%				95%		95%		95%		95%				
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,39%	17,84%				19,66%		19,50%		20,36%		21,23%				
	Meningkatnya Penerimaan			Persentase Persentase Penerimaan PAD	1,72%	3,94%				3,97%		4%		4,03%		4,06%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)																			
		5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	1,36%	2,5%	4.185.000.000	2,5%	4.394.250.000	2,5%	4.844.662.000	2,5%	4.813.964.000	2,5%	4.844.662.000	2,5%	5.066.895.000	2,50%		
				Persentase Harmonisasi Pelaksanaan Pendapatan Transfer	NA	90%		92,5%		95%		97,5%		100%		100%		100,00%		
				Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	5%	5%	4.185.000.000	5%	4.394.250.000	5%	4.813.964.000	5%	4.813.964.000	5%	4.844.662.000	5%	5.066.895.000	5%		BPPKAD Bidang Pemagahan, Keberanian dan Pelajaran
				Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		Bidang Pemencanaan dan Pendaftaran
TOTAL							470.038.068.795		493.860.038.000		518.368.235.000		544.287.701.00		571.502.089.000		571.502.089.000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Rembang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 -2026, BPPKAD bertanggungjawab atas ketercapaian Misi 1 yaitu “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”, Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih” dan Sasaran I yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”.

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BPPKAD bertanggungjawab atas tercapainya satu indikator kinerja dari Sasaran I yaitu “Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Atas wewenang dan urusan yang diampu oleh BPPKAD Kab. Rembang, ada 2 (dua) Indikator Kinerja BPPKAD Kab. Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD selama 5 (lima) tahun (tahun 2022-2026) dengan target dari kedua indikator kinerja tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BPPKAD Kab. Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Opini BPK Atas LKPD	Opini	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	17,39	NA	17,84	18,66	19,5	20,36	21,23	21,23

Sedangkan dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 - 2026, ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kab. Rembang selama 5 (lima) tahun (tahun 2021-2026) dengan target capaian dari ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel 7.2. sebagai berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 - 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	85	NA	90	92,5	95	97,5	100	100
2.	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	NA	NA	70	72,5	75	77,5	80	80
3.	Persentase Peningkatan PAD	%	1,72	NA	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06	4,06

Adapun dalam rangka mengukur ketercapaian Indikator Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 - 2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 - 2026 diberikan Penjelasan (Formulasi / Rumus Perhitungan) Sumber Data dan SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab ketercapaian dan ketersediaan data tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel 7.3. sebagai berikut :

Tabel 7.3.
Formulasi/Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022 - 2026

No.	Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan (Formulasi / Rumus Perhitungan)	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Opini BPK atas LKPD	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK	Semua SKPD dengan Dikoordinasi BPPKAD
2.	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	$(1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran}) + (1/3 \text{ Persentase penyerapan belanja daerah}) + (1/3 \text{ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik}) \times 100\%$	Dokumen KUA, Dokumen RAPBD, Dokumen APBD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi
3.	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	$(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD}) \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	Bidang Aset
4.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$	LRA Tahunan	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan
5.	Persentase Peningkatan PAD	%	$\frac{\text{PAD Th}(n) - \text{PAD Th}(n-1)}{\text{PAD Th}(n-1)}$	LRA Tahun (n) dan LRA Tahun (n-1)	Bidang Perencanaan dan Pendaftaran

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berwawasan lima tahun menjadi acuan pokok bagi jajaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan sebagai implementasi dan tugas pokok dan fungsi Badan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun. Uraian program prioritas dan program unggulan merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 yaitu "**Rembang Gemilang 2026**". **GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gambLANG**. BPPKAD juga bertanggungjawab atas ketercapaian Misi 1 yaitu "Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi", Tujuan 1 yaitu "Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih" dan Sasaran I yaitu "Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan".

Dengan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menyusun rencana kerja dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel. Indikator Tujuan : Opini BPK Atas LKPD.
2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.

Tujuan dan Sasaran BPPKAD Kabupaten Rembang tersebut diatas akan dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terkait dan didukung dengan sarana dan prasarana, pembiayaan serta metode kerja yang memadai.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026 yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rembang, 9 Mei 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710225 199803 1 004

CASCADE BPPAD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022
BERDASARKAN PELUAKHIFAN PERMENDAG RINDO 90 TAHUN. 4P19

TUJUAN	KEPALA BPPAD INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah "5M" Akuntabel	Opot BPC atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Asil Daerah (P)	Proporsi Pendidikan Asil Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	17,14

SISARAN	KEPALA BPPAD INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perentase Kualitas Laporan Keuangan Daerah	90,00
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengkondan Barang Milik Daerah	76,00
3. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Perentase Pendapatan Asli Daerah	394

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Perunggi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SACP PD BPPAD	72,04
	Nilai IKM PD BPPAD	82

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Perencanaan, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Realisasi Kerja Sama Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja Sama SKPD	2 Laporan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Adaptasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangar dengan kualitas baik	2 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi pemerintahan	95%
Persediaan, jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi pemerintahan	99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengalihan BMD yang dikeola dengan baik	1 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikeola dengan baik	4 Dokumen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunggi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengalihan BMD yang dikeola dengan baik	1 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Perencanaan, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Realisasi Kerja Sama Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja Sama SKPD	2 Laporan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

KEPALA BIDANG PELAKSANAAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengadaan Pendanaan Daerah	% Realisasi Pembiayaan Pendanaan Asli Daerah	100,00%

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Pendanaan Daerah	% Pembiayaan Wajib Pajak Daerah	2,50%

KEPALA BIDANG ASSET			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pembiayaan yang Berjalan SMD dan/ atau SMD baru/ tamb dan lainnya	100%	
	% cadang BMD yang dimanfaatkan	100%	

KEPALA BIDANG ANGGARAN			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan APBD dan/ atau APBD	100%	
	% Keseluruhan Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan/ atau PPKS APBD dan/ atau APBD	90%	

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Realisasi Barang Barter/ Barang Bantu yang telah diinputkan	95%

KEPALA BIDANG AKUNTANSI		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penginputan Akun/ Akumulasi (seuai satu) dan Tagal Valid	100%

KA SUB BID PENERAPAN, PENGUJIAN DAN IEREBATYU		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pengujian Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah	30 Dokumen

KA SUB BID PERENCANAAN, PENGGALIAN POTENSI, PENGUJIAN DAN IEREBATYU		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pengembangan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Kelembagaan Pajak Daerah	2 Dokumen

KA SUB BID PERENCANAAN, PENGGALIAN DAN IEREBATYU			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	2 Dokumen	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	40 Laporan	

KA SUB BID PERENCANAAN ANGGARAN			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPKS	Jumlah Dokumen KUA dan PPKS yang Disetujui	2 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPKS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPKS yang Disetujui	2 Dokumen	

KA SUB BID PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Anggaran Kas Daerah, Laporan Utang Daerah dan/ atau Laporan Pertanggungjawaban dan/ atau Laporan Pertanggungjawaban Fiskal Kelapa (FRK)	Jumlah Laporan Realisasi Pemerintahan dan Anggaran Kas Daerah, Laporan Utang Daerah dan/ atau Laporan Pertanggungjawaban dan/ atau Laporan Pertanggungjawaban Fiskal Kelapa (FRK)	38 Laporan	

KA SUB BID PENERIMAAN PENGELUARAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kas Daerah	40 Laporan	

KEPALA BIDANG PELAKSANAAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Pendanaan Daerah	% Realisasi Pembiayaan Pendanaan Asli Daerah	100,00%

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Pendanaan Daerah	% Pembiayaan Wajib Pajak Daerah	2,50%

KEPALA BIDANG ASSET			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pembiayaan yang Berjalan SMD dan/ atau SMD baru/ tamb dan lainnya	100%	
	% cadang BMD yang dimanfaatkan	100%	

KEPALA BIDANG ANGGARAN			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan APBD dan/ atau APBD	100%	
	% Keseluruhan Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan/ atau PPKS APBD dan/ atau APBD	90%	

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Realisasi Barang Barter/ Barang Bantu yang telah diinputkan	95%

KEPALA BIDANG AKUNTANSI		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penginputan Akun/ Akumulasi (seuai satu) dan Tagal Valid	100%

KEPALA BIDANG PELAKSANAAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Pendanaan Daerah	% Realisasi Pembiayaan Pendanaan Asli Daerah	100,00%

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Pendanaan Daerah	% Pembiayaan Wajib Pajak Daerah	2,50%

KEPALA BIDANG ASSET			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pembiayaan yang Berjalan SMD dan/ atau SMD baru/ tamb dan lainnya	100%	
	% cadang BMD yang dimanfaatkan	100%	

KEPALA BIDANG ANGGARAN			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan APBD dan/ atau APBD	100%	
	% Keseluruhan Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan/ atau PPKS APBD dan/ atau APBD	90%	

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN			
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Realisasi Barang Barter/ Barang Bantu yang telah diinputkan	95%	

KEPALA BIDANG AKUNTANSI		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penginputan Akun/ Akumulasi (seuai satu) dan Tagal Valid	100%

KA SUB BID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENDANAAN DAERAH				KA SUB BID PENJAJAN DAN PELAYANAN				KA SUB BID PENCAHAIAN DAN PENATAUSAHAAN ASET				KA SUB BID ANALISA KEBUJUKAN ANGGARAN				KA SUB BID PENGELUARAN KAS DAERAH				KA SUB BID PELAPORAN KEAMALIHAN			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REVISI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REVISI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REVISI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REVISI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REVISI				
Pengolahan, Pengiriman, dan Penyelesaian Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Penyelesaian, dan Penyelesaian Data Pajak Daerah	48 Laporan		Pendataan dan Pengiriman Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengiriman Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	300 Objek Pajak		Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyetoran Pajak Daerah	40 Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dan verifikasi Perubahan SKPD yang Diverifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		Fasilitasi, fasilitasi, Asistensi, Sosialisasi, dan Monitoring Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistensi, Sosialisasi, dan Monitoring Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19 Laporan	
Pengujian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penilaian dan Verifikasi	100 Dokumen		Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Diselesaikan (UJOP) Periode Hak dan Bangunan (BPHB)	150 Objek Pajak		Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengiriman, Penyetoran, Penyetoran, Penyetoran, Penyetoran, dan Penyetoran Pajak Daerah	40 Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DP-CPA-SKPD	Jumlah Perubahan DP-CPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		Penyusunan dan Pengiriman Surat Perintah Kas serta SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Data dan Pengiriman Kas serta Pengiriman Surat Perintah Kas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19 Laporan	

